



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus Dana BK Bakal Seret Pejabat

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH mengungkapkan, kasus dugaan korupsi Dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 kemungkinan bakal menyeret oknum pejabat di Pemerintah Kota Bengkulu dalam perkara tersebut. Untuk menguak kepastian siapa orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini, tim Penyidik Kejari masih memerlukan keterangan saksi ahli masalah tunjangan dana BK ini. "Bisa jadi ya kasus dana BK ini bisa berkembang ke pejabatnya. Untuk memastikan hal itu sekarang kita sudah mulai mencari saksi ahli yang bisa menguatkan langkah yang akan diambil tim penyidik dalam perkara ini," ucap Kajari kemarin.

Dijelaskan, hingga saat ini masalah perkembangan audit kerugian negara dalam perkara tersebut, ia mengaku bahwa audit untuk menghitung kerugian negara secara ril dalam perkara ini sudah selesai. Hanya saja masih ada sedikit yang perlu ditambahkan sebelum tim penyidik mengambil langkah dalam perkara ini.

"Masih ada sedikit lagi yang perlu ditambahkan untuk persiapan ke penuntutan sikap dalam perkara ini," imbuhnya. Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan Perwal nomor 36.

Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 Juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 Juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 kemudian Rp 500 Juta diduga digunakan untuk prapradilan. (ide)